

Kajian: Dampak Pemotongan Anggaran Kemenkes terhadap Layanan Kesehatan

Pendahuluan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menjadi salah satu kementerian atau Lembaga yang terkena efisiensi anggaran sebesar Rp19,6 triliun dari pagu awal Rp105,7 triliun, setara dengan 18,54%. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pemotongan ini bertujuan untuk realokasi dana ke program prioritas yang membutuhkan pendanaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, termasuk Rp256,1 triliun dari kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama dalam mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan. Mengingat kesehatan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat program utama seperti layanan kesehatan dasar, pengadaan obat, dan pengembangan infrastruktur kesehatan.



[Instagram](#)

1. Dampak terhadap Program Prioritas Kesehatan

Pemotongan anggaran ini memaksa Kemenkes untuk melakukan efisiensi dalam berbagai sektor layanan kesehatan. Beberapa program prioritas yang sebelumnya direncanakan dapat mengalami perubahan atau penyesuaian agar tetap dapat berjalan meskipun dengan alokasi dana yang lebih kecil. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang direncanakan pemerintah juga berpotensi terdampak pemangkasan anggaran dapat memengaruhi target sasaran program ini yaitu dari 280 juta orang, kini diperkirakan hanya dapat mencakup 200

juta orang. Menkes Budi menyatakan bahwa realisasi program akan dievaluasi setelah enam bulan untuk menentukan apakah diperlukan tambahan anggaran.

2. Alokasi dan Pemotongan Anggaran

Pemotongan anggaran ini terutama menyasar beberapa aspek, antara lain:

- a. Pengurangan Belanja Operasional Non-Esensial: Kemenkes mengurangi anggaran minimal 50% untuk kebutuhan seperti alat tulis kantor, barang cetak, alat kebersihan, listrik, air, telepon, internet, serta pemeliharaan gedung dan kendaraan.
- b. Pembatasan Perjalanan Dinas: Perjalanan dinas dibatasi dengan lebih mengutamakan mekanisme daring untuk pertemuan serta kegiatan sosialisasi guna menekan biaya transportasi dan akomodasi.
- c. Penggunaan Sarana dan Prasarana: Pengaturan lebih ketat terhadap penggunaan lift dan pendingin ruangan, serta penerapan penghematan listrik dan air secara disiplin di seluruh unit kerja.

3. Potensi Gangguan terhadap Pelayanan Kesehatan

Dengan berkurangnya anggaran, ada kemungkinan layanan kesehatan publik akan mengalami penurunan kualitas, seperti:

- a) Pengurangan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
- b) Pengurangan stok obat dan alat kesehatan di rumah sakit serta puskesmas.
- c) Berkurangnya insentif bagi tenaga kesehatan, yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan mereka.
- d) Penundaan atau pembatalan proyek infrastruktur kesehatan yang telah direncanakan.
- e) Kurangnya efisiensi terhadap obat-obatan dan vaksin.
- f) Terganggunya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang sudah terlaksana.

4. Mitigasi dan Alternatif Solusi

Untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal, Kemenkes melakukan beberapa langkah mitigasi:

- a. Optimalisasi Anggaran: Memastikan alokasi anggaran tetap berfokus pada pelayanan esensial seperti pengobatan penyakit menular dan peningkatan kapasitas rumah sakit.
- b. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Menggandeng pihak swasta untuk mendukung program kesehatan melalui skema Public-Private Partnership (PPP).
- c. Evaluasi Program Secara Berkala: Mengevaluasi efektivitas pemangkasan anggaran setiap enam bulan guna memastikan layanan tidak terdampak signifikan.

5. Realokasi Dana: Solusi atau Ancaman?

Pemerintah menyatakan bahwa pemotongan ini dilakukan demi efisiensi dan realokasi ke sektor lain yang membutuhkan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung

pada fasilitas kesehatan publik. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan memantau keefisiensi yang terjal sampai bulan Juni, selain itu transparansi dalam proses realokasi dana harus dijaga untuk memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi sektor kesehatan dan masyarakat luas.

6. Respon Publik dan Kepercayaan terhadap Pemerintah

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan layanan kesehatan publik. Kurangnya sosialisasi dan kejelasan mengenai program mana yang akan terdampak dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi Kemenkes untuk memberikan penjelasan yang transparan dan solutif agar masyarakat tidak merasa dirugikan oleh kebijakan ini.

Kesimpulan

Pemotongan anggaran Kemenkes sebesar Rp19,6 triliun memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek layanan kesehatan di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk efisiensi dan realokasi, kebijakan ini berisiko mengganggu layanan kesehatan bagi Masyarakat terutama program prioritas dan keefisienan obat-obatan dan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pemotongan ini tidak merugikan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas layanan kesehatan, pemantuan selama pemotongan dana dilakukan atau keefisienan, mengalokasikan dana secara transparan, serta meningkatkan komunikasi publik terkait kebijakan ini.

Referensi

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f70fa3af470202320d7231eb44e88e6693a3647e5ec9ebe7e510da774d1edf04JmltdHM9MTczOTQwNDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=146fa94f-7973-61a0-1527-bc3c78256031&psq=dampak+pemotongan+pagu+kemenkes&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3VhcmEuY29tL25ld3MvMjAyNS8wMi8wNS8xNjQ4MTIvbWVua2VzLWFrdWkta2ViaWpha2FuLXBibW90b25nYW4tYW5nZ2FyYW4tYmVyZGFtcGFrLWJhZ2FpbWFuYS1kZW5nYW4tbGF5YW5hbi1rZXNlaGF0YW4&ntb=1>

[Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan](#)

[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8fd328c800b112fda21707988e20e9bf70288a9a60c4ec380525b715c645c155JmltdHM9MTczOTQwNDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=146fa94f-7973-61a0-1527-bc3c78256031&psq=Dampak+Pemangkasan+Anggaran+Kesehatan+Terhadap+Kebijakan+dan+Sistem+Kesehatan+di+Indonesia+&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nZ2FyYW4tYmVyZGFtcGFrLWJhZ2FpbWFuYS1kZW5nZ2FyYW4tYmVyZGFtcGFrLWJhZ2FpbWFuYS1kZW5nYW4tbGF5YW5hbi1rZXNlaGF0YW4tZ3JhdGlzLW5nZ2FrLXBibW90b25nYW4tYW5nZ2FyYW4tYmVyZGFtcGFrLWJhZ2FpbWFu&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8fd328c800b112fda21707988e20e9bf70288a9a60c4ec380525b715c645c155JmltdHM9MTczOTQwNDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=146fa94f-7973-61a0-1527-bc3c78256031&psq=Dampak+Pemangkasan+Anggaran+Kesehatan+Terhadap+Kebijakan+dan+Sistem+Kesehatan+di+Indonesia+&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nZ2FyYW4tYmVyZGFtcGFrLWJhZ2FpbWFuYS1kZW5nYW4tbGF5YW5hbi1rZXNlaGF0YW4tZ3JhdGlzLW5nZ2FrLXBibW90b25nYW4tYW5nZ2FyYW4tYmVyZGFtcGFrLWJhZ2FpbWFu&ntb=1)

https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/15590081/anggaran-kemenkes-dipotong-rp-19-triliun-bakal-pengaruhi-program-kesehatan?utm_source=chatgpt.com

https://setjen.kemkes.go.id/berita/detail/efisiensi-anggaran-kementerian-kesehatan-strategi-pengendalian-belanja-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250205160409-33-608247/anggaran-kemenkes-dipangkas-rp19-t-pejabat-terbang-kelas-ekonomi>